

## **Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Di Wonorejo Surabaya**

Diana Hertati  
Program Studi di Ilmu Administrasi Negara, FISIP  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
email: dianahertati.dh@gmail.com

### **Abstrak**

Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya merupakan salah satu kawasan hutan lindung di Surabaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Ekowisata mangrove tersebut dapat dikembangkan sebagai wisata alternatif yang memiliki nilai tambah baik untuk peningkatan potensi ekonomi lokal masyarakat pesisir maupun untuk sarana pengenalan keragaman ekosistem dan biota wilayah pesisir dan lautan. Makalah ini mengkaji potensi ekowisata mangrove serta upaya pengelolaannya pada suatu kawasan konservasi yang didasarkan pada dinamika dan status kerusakan ekosistem. Hal ini dilatarbelakangi bahwa ekosistem hutan mangrove saat ini mengalami tekanan yang berdampak kurangnya luasan mangrove. Pelestarian mangrove dapat dilakukan dengan penggalakan kegiatan konservasi dan pengikutsertaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya dukungan dari pemerintah Kota Surabaya untuk mempersiapkan fasilitas, menyediakan sarana dan prasarana, memberdayakan masyarakat sekitar serta yang tak kalah pentingnya adalah mempromosikan wilayah tersebut sebagai daerah tujuan wisata alternatif.

Kata kunci : pengembangan ekowisata, mangrove, potensi ekonomi lokal, masyarakat

### ***Development Of Community-Based Ecotourism Of Mangrove Forest In Wonorejo, Surabaya***

#### ***Abstract***

*Wonorejo Mangrove Ecotourism of Surabaya is one of the protected forest areas in Surabaya as mentioned in the Regional Regulation Number 3 of 2007 regarding with Surabaya Urban Spatial Planning. Ecotourism mangrove can be developed as an alternative tourism that has an added value both for the improvement of coastal communities' local economic potential as well as for the introduction of ecosystems and biota diversity of coastal areas and oceans. This study inspects on the potential of mangrove ecotourism and its management efforts in a conservation zone based on the subtleties and status of ecosystem impairment. It is receded that the mangrove forest ecosystem is currently undergoing pressures that affect the shrinkage of mangrove area. Mangrove conservation can be carried by promoting conservation activities and community participation. To achieve these tasks, there are requirements to support from the government of Surabaya City in preparing the facilities, provide means and infrastructure, empower the surrounding community as well as what more important is to promote the region as an alternative tourist destination.*

*Keywords: ecotourism development, mangrove, local economic potency, community*

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.508 pulau dengan garis panjang pantai kurang lebih 81.000 km, meliputi sumberdaya pesisir yang sangat besar baik hayati dan nonhayati. Ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber yang mendapat perhatian di wilayah pesisir. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber daya pesisir, bahwa wilayah pesisir terdiri atas sumber daya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan sebagainya), sumber daya nonhayati (pasir, air laut, mineral dasar laut); sumber daya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan), dan jasa-jasa lingkungan (berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Hutan mangrove terluas di Indonesia yakni sekitar 27% luas mangrove dunia berada di Indonesia dengan tingkat keaneka ragaman hayati yang sangat tinggi (Hamid, 2013).

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna yang berada di daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan. Tanaman mangrove berperan juga sebagai buffer (perisai alam) dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan maerial dari darat yang terbawa air sungai.

Di era otonomi saat ini potensi sumberdaya hutan mangrove merupakan aset daerah yang sangat besar kontribusinya dalam pembangunan khususnya pembangunan daerah pesisir. Karena itu, salah satu prioritas dalam pembangunan adalah pelestarian hutan mangrove, dengan tetap mempertahankan dan melestarikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya lokal setempat. Hasil studi di beberapa daerah pantai menunjukkan bahwa keberadaan hutan mangrove sangat memberikan manfaat pada masyarakat pesisir berupa barang yang didapat melalui peningkatan hasil tangkapan dan perolehan kayu bakau yang mempunyai nilai ekspor tinggi. Selain itu, kawasan tersebut menyediakan jasa lingkungan yang sangat besar, yaitu perlindungan pantai dari badai dan erosi serta pendapatan langsung bagi masyarakat melauai kegiatan wisata (Krauss, dkk. 2009).

Pengembangan ekowisata merupakan salah satu alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah agar menghasilkan nilai tambah yang nyata dan positif bagi kegiatan konservasi lingkungan dan budaya setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tuwo, 2011). Saat ini aktivitas ekowisata tengah menjadi tren yang menarik yang dilakukan oleh para wisatawan untuk menikmati bentuk wisata yang berbeda dari biasanya. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur.

Masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu : a) harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, b) telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu, c) adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama (Ahmadi, 2009 : 97).

Menurut Isbandi (2007: 27) Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Slamet (1994) menggolongkan tipe partisipasi masyarakat yaitu : a) partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, b) penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan c) penggolongan berdasarkan pada dalam berbagai tahap proses pembangunan d) penggolongan berdasarkan tingkat organisasi e) penggolongan berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan f) penggolongan berdasarkan pada lingkup kegiatan g) penggolongan berdasarkan pada efektivitas h) penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat. i) penggolongan berdasarkan gaya partisipasi.

Kemudian Satria (2009) memberi kritikan terhadap konsep ekowisata antara lain: 1) rendahnya partisipasi masyarakat dalam Ekowisata. Pentingnya Partisipasi masyarakat sebagai stakeholder dalam pengembangan kawasan wisata kadang dilupakan dalam pengembangan wilayah Ekowisata. Masyarakat sekitar tidak dilibatkan secara aktif, 2) dampak negatif dari pariwisata terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar dan turis tentang konsep ekowisata, 3) pengelolaan yang salah. Di beberapa wilayah di Indonesia pengelolaan yang salah dari konsep ekowisata seringkali terjadi, dikarenakan pemahaman yang rendah dari konsep Ekowisata juga karena lemahnya peran dan pengawasan pemerintah untuk mengembangkan wilayah wisata secara baik. Untuk mengembangkan pengelolaan ekowisata, diperlukan koordinasi antar lembaga untuk menghindari konflik antar pemanfaat wilayah pesisir. Adanya berbagai pihak yang melakukan aktivitas di kawasan pesisir tanpa disertai konservasi dan pemulihan akan berdampak terhadap menurunnya kondisi lingkungan.

Aspek suprastruktur merupakan fasilitas penunjang untuk pengunjung seperti penginapan, restoran, kolam renang. Aspek infrastruktur (ketersediaan air bersih, pembuangan sampah dan sumber daya listrik, akses ke airport, jalan, pelabuhan). Tanpa adanya kedua aspek tersebut, maka pariwisata akan berdampak negatif (Amanah dan Utami, 2009). Selanjutnya Tuwo (2011) menjelaskan empat prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi agar dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut : (1) masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata, (2) mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat lokal, (3) mendidik atau menyadarkan masyarakat lokal dan wisatawan akan pentingnya konservasi, (4) mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata, sata dapat menerima langsung pendapatan.

Menurut Atta dkk (2013) konsep ekowisata lebih baik jika dikembangkan lagi dengan konsep ekowisata berbasis masyarakat atau Community Based Ecotourism (CBE). Pengembangan eko-wisata CBE akan memiliki multiplier effect yang sangat luas dalam upaya mempertahankan kondisi lingkungan dari sisi ekologis namun tidak melupakan peningkatan perekonomian masyarakat lokal dari sisi ekonomi.

Jaafar (2012) dalam penelitiannya tentang “Ecotourism-related products and activities, and the economic sustainability of small and medium island chalets”. Meneliti pada Pulau Redang, Kapas dan Pulau Perhentian Besar dan Kecil (The Redang Island Marine Park), serta Pulau Tioman (The Tioman Island Marine Park) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata telah mencapai batas optimum, dimana jumlah permintaan wisata melebihi suplai yang tersedia. Untuk mencegah

kerusakan lingkungan, diperlukan upaya pelestarian melalui pengembangan model pengelolaan yang berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kemudian Agusriadi (2013) tentang “Kajian Potensi Ekowisata Bahari di Pulau Balai Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”. Identifikasinya diantaranya berdasarkan 1) Kunjungan wisatawan 2) Pelaku usaha wisata 3) Peranan pemerintah lokal / daerah 4) Nilai WTA dan WTP 5) Potensi ekonomi wisata bahari. Relevansi penelitian sebelumnya dengan kajian ini adalah mengkaji potensi wisata, faktor internal dan eksternal sebagai dasar strategi, yang membedakan adalah pembahasan potensi berdasarkan perspektif pariwisata dengan mengacu kepada pengembangan potensi dan daya tarik wisata.

Sedangkan kondisi eksisting di lapangan menunjukkan bahwa mangrove tengah menghadapi tantangan utama berupa alih fungsi lahan. Berbagai kepentingan yang seringkali mengorbankan keberadaan mangrove seperti tambak, pemukiman, perkebunan, industri dan infrastruktur pantai/pelabuhan. Masalah lain yaitu pemahaman masyarakat tentang mangrove yang masih rendah dan tumpang tindih kebijakan di tingkat nasional hingga daerah dan kondisi ini diperburuk dengan pencemaran oleh limbah plastik, limbah rumah tangga dan tumpahan minyak ([http://ppid.menlhk.go.id//siaran\\_pers](http://ppid.menlhk.go.id//siaran_pers), diakses tanggal 25 Agustus 2017).

Masyarakat Ekowisata (The Ecotourism Society, 1991 dalam Wood, 1996 dalam Lash, 1997) menjelaskan bahwa ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata dalam definisi ini dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni sebagai: (1) produk, merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. (2) pasar, merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan (3) pendekatan pengembangan, merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan (Damanik, 2006).

Dari beberapa pengertian ekowisata, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip utama yaitu: 1) Model pengembangan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami, 2) untuk menikmati keindahannya, juga melibatkan unsur pendidikan (Edu- Tourism), pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, 3) memiliki fungsi sosial budaya ekonomi seperti peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat sekitar. Dalam skema diatas, maka dikelompokkan kedalam lingkungan sosial yaitu Cultural, Educational, Scientific dan Adventure dimana kehidupan masyarakat sekitar obyek wisata dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan demikian juga halnya dengan lingkungan biotik dan abiotik yang meliputi Agrotourism. Sehingga dapat disimpulkan, ekowisata (ecotourism) merupakan kegiatan wisata yang berhubungan dengan lingkungan secara keseluruhan.

Pemerintah, pemilik modal dan masyarakat memiliki peranan penting untuk dapat melaksanakan kegiatan ekoturisme yang dapat digunakan sebagai alternatif solusi dalam memberikan kontribusi pendapatan, terutama bagi kawasan-kawasan lindung seperti hutan lindung, taman hutan rakyat maupun kawasan mangrove sekalipun. Permasalahannya adalah bagaimana pemasukan dari wisatawan tetap mengalir dengan tanpa merusak atau mengurangi nilai dari lingkungan yang disadari sebagai aset utama obyek daya tarik wisata dan bagaimana uang dari wisatawan mengalir kembali untuk proses konservasi lingkungan dan uang itu mengalir kembali ke masyarakat lokal.

## **Metode**

Berdasarkan deskripsi dan fenomena tersebut diatas, maka tulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang fokusnya adalah dengan studi kepustakaan berupa referensi yang relevan dalam rangka untuk mendikursuskan teori dan beberapa jurnal sebagai pisau analisis, sehingga dapat ditarik suatu simpulan dari hasil analisis dan sintesis.

## **Hasil dan Pembahasan**

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari dan wisata hutan di Timur Surabaya khususnya di Wonorejo menjadi sasaran utama Pemerintah Kota Surabaya, karena masyarakat menginginkan adanya wisata yang berbeda dari yang ada sekarang ini terutama wisata alam. Penulis telah beberapa kali mencoba menggali informasi terkait dengan hal tersebut dan hasilnya cukup positif untuk dapat dikembangkan dengan lebih profesional dan mandiri. Hanya saja, ada beberapa informasi yang perlu ditelaah terkait dengan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya jika ingin benar-benar mengembangkan Hutan mangrove Wonorejo sebagai salah satu destinasi baru di pesisir timur Surabaya. Pengembangan wisata di Wonorejo harus menghindari azas Pariwisata massal (Mass Tourism) seperti yang ada daerah lain, meskipun telah terbukti memberikan sumbangan pemasukan yang besar bagi perekonomian suatu kawasan atau daerah.

Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan : 1) jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan dampak yang ditimbulkan terhadap alam relatif kecil dibanding pariwisata massal, 2) ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil, mudah dikelola dan lebih mudah diterima masyarakat local 3) dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, 4) memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural sustainability) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap kebudayaan lokal.

Dari berbagai manfaat yang dapat diperoleh dalam pengembangan hutan wisata Mangrove Wonorejo Surabaya, tentunya ada beberapa hal yang perlu dan penting diperhatikan terkait dengan pengembangannya: 1) Pengukuran daya dukung lingkungan mikro baik ekosistem pantai maupun lingkungan masyarakat local yang relative dinamis agar tidak terjadi overload dalam pengelolaannya, yang tentunya akan berdampak pada kawasan itu sendiri, 2) fungsi kelembagaan masyarakat dalam mengelola kawasan tersebut nantinya agar mampu mandiri baik dari sisi softskill maupun kemandirian secara ekonomi, 3) perlu adanya pembatasan transportasi pribadi yang masuk ke zona inti hutan mangrove, hal ini selain dapat merusak kondisi jalan masuk juga mengganggu aktifitas satwa liar disana. Di sisi lain masyarakat melalui lembaga yang telah dibentuk dapat mengadakan persewaan sepeda gunung atau sewa lahan parkir sehingga wisatawan diwajibkan berjalan kaki untuk menikmati kawasan ini.

Suatu kesalahan bila keuntungan yang diserap dari kegiatan wisata alam tanpa melibatkan penduduk lokal karena mereka merupakan mitra dalam proses konservasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, perlu pendekatan yang komprehensif dalam pariwisata untuk dapat menggabungkan suatu komitmen yang kuat terhadap

pelestarian alam serta tanggung jawab sosial ekonomi yang besar kepada masyarakat local. Pada era tahun 80-an, konsep Ecotourism (yang merupakan kependekan dari Ekologi Wisata, atau ekowisata) sebagai suatu bagian dari pembangunan pariwisata memiliki pendekatan perekonomian suatu kawasan atau daerah.

### **Simpulan**

Sebagai alternatif kawasan tujuan wisata, pengembangan daerah ekowisata di Indonesia belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun sebenarnya, banyak manfaat yang dapat diperoleh, antara lain untuk kepentingan peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (konservasi). Kawasan hutan mangrove Wonorejo Surabaya menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove. Selain karena kondisi hutan mangrove yang masih sangat alami, keanekaragaman flora dan fauna yang menjadikan kawasan tersebut sebagai habitat merupakan daya tarik tersendiri. Lebih lanjut, kawasan hutan mangrove Wonorejo dapat pula direkomendasikan sebagai sarana pendidikan bagi kalangan siswa sekolah dan mahasiswa untuk lebih mengenal keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.

### **Ucapan terima kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap civitas akademika UPN "Veteran" Jawa Timur pada umumnya dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada khususnya atas dukungan untuk keikutsertaan dalam acara Seminar Nasional. Terimakasih juga kepada Bapak Drs. Ananta Prathama, MSi selaku Ketua UPT Perpustakaan UPN "Veteran" Jatim.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi, A. (2009). Ilmu pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amanah, S. & Utami, N. (2006). Perilaku nelayan dalam pengelolaan wisata bahari di kawasan Pantai Lovina, Buleleng, Bali. *Jurnal Penyuluhan*, 2, (2): 83-90.
- Atta, M., Hakim, & M., Yanuwiadi. (2013). Analisis dan potensi dan arahan strategis kebikana pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumiaji-Kota Batu. *Journal of Indonesia Tourism and Development Studies*, 1(2): 68-78.
- Damanik, J. & Helmut, F. W. (2006). Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi. Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR). Yogyakarta: UGM dan ANDI Press.
- Hamid, H. (2012). Struktur komunitas Serangga herbivora dan parasitoid pada polong tanaman kacang-kacangan (fabaceae) di Padang. Padang: Universitas Andalas.
- Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: Dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP IU Press.
- Krauss, K. W., Lovelock, C. E., McKee, K. L., López -Hoffman, L., Ewe, S. M., & Sousa, W. P. (2009). Environmental drivers in Mangrove establishment and early development: A view. *Aquatic Botany*, 89 (2): 105-127.

- Satria, D. (2009). Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3 (1): 37-47.
- Tuwo, A. (2011). *Pengelolaan ekowisata pesisir dan laut - suatu pendekatan ekologi, sosial-ekonomi, kelembangaan, dan sarana wilayah*. Surabaya: Brilian Internasional.